

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PULAU PALAS
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**SM. Amirul Zikry
NPM : 137310306**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : SM. Amirul Zikry
NPM : 137310306
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal
Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa
Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensif.

Pekanbaru, Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Zaini Ali, M.Si



Data Wardana, S.Sos, M.Ip

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Budi Muliando, S.Ip, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : SM. Amirul Zikry
NPM : 137310306
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal
Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa
Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensif.

Pekanbaru, 18 Maret 2020

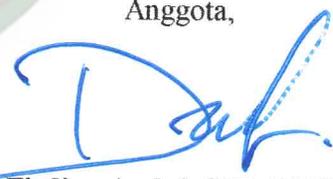
Ketua


Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si

Sekretaris

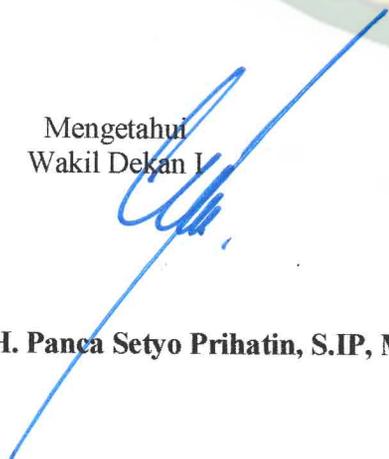

Andriyus, S.Sos, M.Si

Anggota,


Dita Fisdian Andni, S.IP, M.IP

Anggota,

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si


Drs. H. Zaini Ali, M.Si

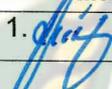
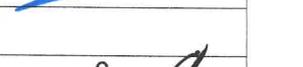
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

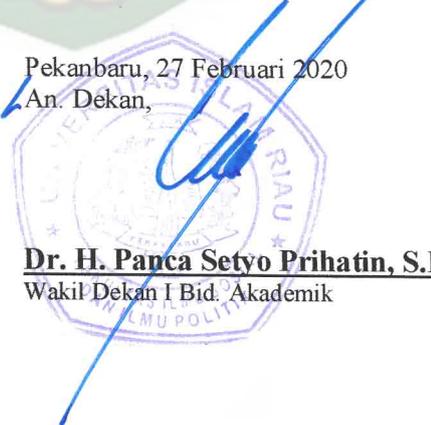
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 045 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 26 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 27 Feb jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

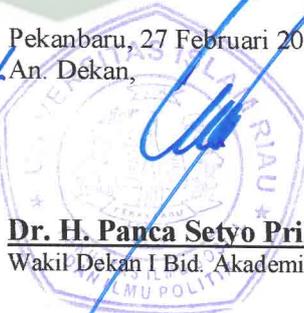
Nama : SM.Amirul Zikry
NPM : 137310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Evaluasi Pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa di desa pulau palas di kecamatan tembilahan hulu kabupaten Indragiri hilir.*

Nilai Ujian : Angka : " 77,4 " ; Huruf : " B_T "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Andni, S.IP., M.IP.	Anggota	3. 
4.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, S.IP., M.PA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 27 Februari 2020
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 045/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **SM.Amirul Zikry**
N P M : 137310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluas Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pulau Palas Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Dr. Khairul Rahman,S.Sos.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Andruyus.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dita Fisdian Adni.,S.,IP.,M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Drs. H. Zaini.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Data wardana.,S.Sos.,M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Agung Wijaksono.,S.IP.,M.PA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SM. Amirul Zikry
NPM : 137310306
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal
Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa
Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensif.

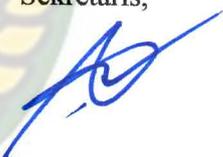
Pekanbaru, 18 Maret 2020

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

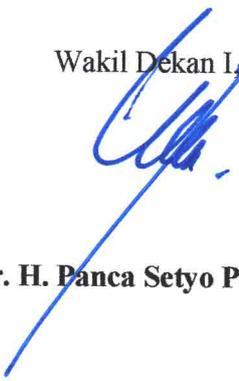

Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si


Andriyus, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si


Budi Muliando, S.IP, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SM Amirul Zikry
NPM : 137310306
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2020
Pelaku Pernyataan



SM Amirul Zikry

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 509/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Menetapkan : 1. **MEMUTUSKAN**
Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Drs. H. Zaini Ali, M. Si
NIP/NPK : 990902174
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Data Wardana, S.Sos., M.IP
NIP/NPK : 15DK1102048
Pangkat/Jabatan : III/b – Ass. Ahli
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : SM Amirul Zikry
NPM : 137310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan. :
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. (Studi Di Kecamatan Tembilahan Hulu).

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada **SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Juni 2018
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. Arsip. --SK Pembimbing.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/24249
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

182010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 604/E-UIR/27-FS/2019 Tanggal 5 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SM AMIRUL ZIKRY**
2. NIM / KTP : 137310306
3. Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **JALAN TAMAN KARYA PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Nomor : 604/E-UIR/27-FS/2019

Pekanbaru, 5 Juli 2019

Lampiran: -

Hal : *Mohon Rekomendasi Riset*

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
di -
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

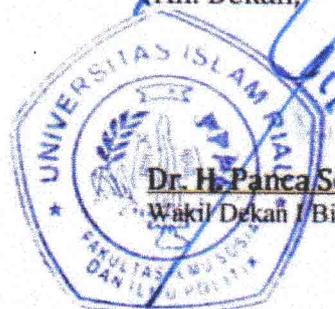
Nama : SM Amirul Zikry
NIM : 137310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Semester : XIII (Tigabelas)
Alamat : Jalan Taman Karya, Pekanbaru.

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir."

Demikian atas kerjasama yang berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, M.Si
Wakil Dekan / Bid. Akademik



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
DESA PULAU PALAS
JALAN PROPINSI PARIT KEPAYANG

KodePos 29251

SURAT KETERANGAN

Nomor : 91 / DPP / XII / 2019

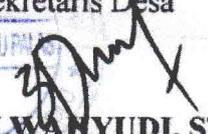
Kepala Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama lengkap : SM AMIRUL ZIKRY
Jenjang : Strata 1 (S1)
Fakultas : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir**
Lokasi Penelitian : Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Yang nama tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian dari Tanggal 12 Juli 2019 s/d 12 Desember 2019 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Judul "**Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pulau Palas, 12 Desember 2019
An, KEPALA DESA PULAU PALAS
Sekretaris Desa


DODL WAHYUDI, ST





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 274/A_UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : SM. Amirul Zikry
NPM : 137310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
Persentase Plagiasi : 28%
Jumlah Halaman : 70 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

Homat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PULAU PALAS
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

SM. AMIRUL ZIKRY

137310306

Kata Kunci: *Evaluasi, Pelaksanaan Tugas, Pendamping Lokal Desa*

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil penelitian, indikator Perencanaan dalam pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa adalah terlaksana karena keberhasilan tugas tersebut tetap berjalan walau ada kendala dalam kegiatan dan aturan yang ditetapkan terhadap masyarakat sehingga apa yang dicapai dalam program tersebut belum tepat sasaran secara menyeluruh dan sesuai. Selanjutnya terhadap pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa adalah cukup terlaksana dengan baik dan hanya sedikit kendala pada proses pengembangan yang lebih luas dan bertujuan pada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemberdayaan tanggapan responden tentang evaluasi pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir di kategorikan terlaksana, dilihat dari indikator pemberdayaan sudah efektif dan tepat sasaran menyentuh secara langsung masyarakat dari program pemberdayaan.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE LOCAL
COORDINATION DUTIES IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE
FUNDS IN PALAS ISLAND VILLAGE, TEMBILAHAN HULU DISTRICT,
INDRAGIRI HILIR DISTRICT**

ABSTRACT

SM. AMIRUL ZIKRY

137310306

Keywords: *Evaluation, Task Implementation, Village Local Companion*

This research was conducted in Pulau Palas Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Implementation of the Village Local Assistance Task in the Management of Village Funds in Pulau Palas Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency. Knowing what factors are hampering the Implementation of the Implementation of the Village Local Assistance Task in the Management of Village Funds in Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency. Based on the results of the study, the Planning indicators in the implementation of the tasks of village local counterparts in managing village funds are carried out because the success of these tasks continues despite the constraints in the activities and rules set for the community so that what is achieved in the program is not yet well targeted and appropriate. Furthermore, the implementation of the task of assisting local village assistants in managing village funds is quite well done and there are only a few obstacles in the wider development process and aiming at disadvantaged communities. Based on the results of the Recapitulation of Empowerment of respondents' responses on the evaluation of the implementation of the task of local village assistants in managing village funds for development in Pulau Palas Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency is categorized as implemented, seen from the empowerment indicators that have been effective and targeted to directly touch the community from the empowerment program.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahabbalamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap makhluk di muka bumi. Kemudian shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada sayyidul anbiya' wal mursalin baginda Nabi Mmuhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan serta mewariskan ilmu pengetahuan yang luas, dan dapat menjadi pegangan hidup umat manusia untuk selamat di dunia dan akhirat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir".

Walau penulis telah berusaha sedaya upaya demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini, tetapi karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran serta masukan dari pihak-pihak yang berkenan demi kesempurnaan yang kita harapkan bersama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun proses penyusunanskripsi ini mendapatkan banyak hal, pengetahuan, wawasan, kesulitan dan kendala. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak baik itu dari segi materil maupun moril, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Muliando S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Data Wardana, S.Sos, M.Ip selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan beserta seluruh staff/pegawai yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
7. Teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua untuk Ayahanda Said Muhammad Zaini S.Sos dan Ibunda Martalena dan Kakak Syarifah Novrialeza Amd dan Adik Said Muhammad Arief Budiansyah beserta keluarga besar yang telah banyak berkorban dan tak

henti-hentinya memberikan doa, dorongan, dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi.

8. Terima kasih juga untuk sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2013 dan buat teman lain yang telah mendoakan saya dan memberi motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Pekanbaru, Maret 2020
Penulis

SM Amirul Zikry



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	
1. Konsep Pemerintahan	12
2. Konsep Pemerintahan Daerah	14
3. Konsep Kecamatan	16
4. Konsep Pemerintah Desa	18
5. Konsep Pelaksanaan Tugas	20
6. Konsep Pendamping Desa	21
7. Konsep Evaluasi	24
B. Kerangka Pikir	26
C. Konsep Operasional	27
D. Operasional Variabel	27
E. Teknik Pengukuran	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Teknik Penarikan Sampel	35

E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	38

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis	41
B. Keadaan Penduduk	43
C. Pendidikan	46
D. Keadaan Pemerintahan	47

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	50
1. Jenis Kelamin	50
2. Umur	52
3. Tingkat Pendidikan	54
B. Hasil dan Pembahasan Data Indikator	55
1. Perencanaan	56
2. Pelaksanaan	60
3. Pemberdayaan	65
4. Pemantauan	67
5. Hasil wawancara	71
6. Rekapitulasi tanggapan responden	75
C. Hambatan	76

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN	82
---------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Desa Kecamatan Tembilahan Hulu 2018..... 6
I.1	Nama-nama Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Indragiri Hilir 7
II.1	Operasional Variabel tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembilahan Hulu) 28
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel tentang Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir35
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembilahan Hulu) 38
III. 3	Penelitian Terdahulu 40
IV.1	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu, 2016 dan 201744
IV.2	Jumlah Dusun, RT, dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu, 2017 49
V.1	Distribusi jumlah responden menurut jenis kelamin mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 51
V.2	Distribusi jumlah Responden menurut umur mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 53
V.3	Distribusi jumlah Responden menurut tingkat pendidikan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 54
V.4	Distribusi tanggapan responden terhadap indikator Perencanaan oleh Pendamping Lokal Desa pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 58

V.5	Distribusi tanggapan responden terhadap indikator Pelaksanaan oleh Pendamping Lokal Desa pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	62
V.6	Distribusi tanggapan responden terhadap indikator Pemberdayaan oleh Pendamping Lokal Desa pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	66
V.7	Distribusi tanggapan responden terhadap indikator Pemantauan oleh Pendamping Lokal Desa pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	69
V.8	Hasil Wawancara	72
V.9	Rekapitulasi tanggapan responden tentang penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1	Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir..... 26
IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Desa Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tembilahan Hulu 46
IV.2	Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kantor Camat Tembilahan Hulu, 2017..... 48

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Halaman
1. Daftar kuisisioner untuk responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	
2. Foto dokumentasi hasil observasi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	
3. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor: 509/UIR-Fs/Kpts/2018 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	
4. Surat Rekomendasi nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24249 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	
5. Surat Mohon Rekomendasi Riset nomor: 604/E-UIR/27-FS/2019 Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
6. Surat Keterangan nomor: 91/DPP/XII/2019 telah melakukan riset di kantor Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir..	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri karena memiliki tujuan yg sangat mulia dimana yg tercantum dalam Pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah utk melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, dan utk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan dari kemerdekaan, perdamaian yg abadi dan tentu saja keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah Pemerintah Indonesia yg terbagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yg menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas kabupaten dan kota, dimana tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Pemerintahan Daerah sendiri yg diatur melalui Undang-undang”. Dan kemudian disebutkan lagi dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota, dan Daerah Kabupaten mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan mereka menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut di atur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dalam undang-undang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan antara keuangan, pelayanan, pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah diatur, dilaksanakan dengan adil selaras berdasarkan undang-undang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana kerja pemerintah tahun 2015 menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menjalankan urusan pemerintah pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Pandangan masyarakat saat ini bahwa desa seperti sering kali terabaikan dalam konteks pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebuah fakta yg sangat sulit terbantahkan. Sosial-ekonomi adalah salah satu aspek yg dapat kita lihat dari desa dan masyarakatnya yg masih berada kondisi tertinggal dan serba kekurangan dibandingkan dengan masyarakat kota pada umumnya. Tentu saja kota dipandang lebih sejahtera jika dibandingkan dengan desa dari tolak ukur ekonomi. Namun untuk negara berkembang seperti di Indonesia, lebih mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi tentu saja pada sektor industri demi mengejar pertumbuhan. Akibatnya tentu saja sektor lain seperti pertanian yg berada di pedesaan dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa pada umumnya dikorbankan begitu saja. Sehingga pembangua hanya terpusat untuk di kota terlebih dahulu daripada kepentingan masyarkat desa jadi dikesampingkan oleh pemerintah.

Pemerintah Desa sebagai unit dari representasi negara menghadapi berbagai keterbatasan kemandirian dalam memelihara eksistensi dan pendanaan desa pemerintahan di dalam suatu wilayah. Kemandirian desa sangatlah penting karena kemandirian desa seharusnya merupakan menjadi fokus dalam perhatian pemerintah dilihat dari sisi filosofis, historis, dan strategis. Fungsi kelembagaan dan struktur pemerintahan desa yg ada pada saat ini belum bisa memberikan dampak yg optimal terhadap kemandirian desa, meskipun legal formal kemandirian desa tidak dipertegas dengan pernyataan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sasaran yg dituju.

Upaya ini dilakukan agar mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu tugas pemerintah melakukan pendampingan dibantu oleh para pendamping-pendamping profesional yang sudah berpengalaman dalam memberdayakan masyarakat dan pembangunan di desa. Tenaga pendamping tersebut ditempatkan di kabupaten, kecamatan dan di desa. Pendampingan tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah menyampaikan bahwa tugas-tugas Pendamping Lokal Desa adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi Desa dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dan keuangan di desa.
2. Mendampingi Desa untuk pelaksanaan pembangunan di Desa.
3. Mendampingi masyarakat Desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
4. Mendampingi Desa untuk pemantauan evaluasi kegiatan pembangunan di desa.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya bahwa Kabupaten Indragiri Hilir membutuhkan Pendamping Lokal Desa agar dapat menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa, pembangunan partisipatif di Desa, dan sebagai fasilitator tingkat Desa dalam memfasilitasi Masyarakat dalam setiap tahapan program Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Inragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Memiliki 20 Kecamatan Yaitu Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kuala Indragiri, Kempas, Concong, Enok, Tanah Merah, Sungai Batang, Reteh, Keritang, Kemuning, Kateman, Mandah, Pulau Burung, Pelangiran, Teluk Belengkong, Batang Tuaka, Gaung, Gaung Anak Serka.

Tembilahan Hulu adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tembilahan dengan ibukota Kelurahan Tembilahan Hulu. Pada awalnya Kecamatan Tembilahan Hulu terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa. Kemudian pada Tahun 2011 berubah menjadi 2 kelurahan dan 4 desa.

Pemerintah Kecamatan Tembilahan Hulu telah membentuk dan menata kembali susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Tembilahan Hulu berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Dengan adanya pemekaran desa dan kelurahan pada Tahun 2011, maka jumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu berubah menjadi 2 kelurahan dan 4 desa yaitu :

1. Kelurahan Tembilahan Hulu dan Kelurahan Tembilahan Barat (Pemekaran Kelurahan Tembilahan Hulu)
2. Desa Sialang Panjang
3. Desa Pekan Kamis
4. Desa Pulau Palas
5. Desa Sungai Intan (Pemekaran Desa Pulau Palas)

Tabel I.1: Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Desa Kecamatan Tembilahan Hulu 2019

No	Desa	Dana Desa	Jenis Kegiatan	Realisasi Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pulau Palas	917.855.750	1. Gedung Olahraga	315.417.000
			2. Rabat Beton Jalan Pinang	31.020.000
			3. Rabat Beton Jalan Akasia	20.497.000
			4. Rabat Beton Jalan Dolar	10.531.000
			5. Jerambah Beton Jalan Putra Jaya	37.990.000
			6. TPT dan Timbunan Jalan Tebing	275.408.000
			7. Rabat Beton Gang PDAM	9.376.000
			8. Drainase Jalan Al Mukminum	43.511.000
			9. Penimbunan Jalan Al Mukminum	33.983.000
			10. Rabat Beton Jalan Bambu Kuning	35.923.000
			11. Tanggul Manual Jalan H. Jailani Awang	30.684.000
			12. Rabat Beton Jalan Sungai Buluh	51.251.000
			13. Kegiatan Pemberdayaan Kader Posyandu	7.322.000

Tabel I.2: Nama-nama Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Indragiri Hilir

NO	NOMOR KTP	NAMA	JENIS KELAMIN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1404184401770001	Astutik Mahdiyani	P
2	1404201511740001	Basyiruddin	L
3	1404041706860006	Arbani, S.Pd	L
4	1404201605920001	Syahrudin, S.Kep	L
5	1404201606880001	Qaulan Karima	L
6	1404205111890001	Riani	P
7	1404082711930001	Jumardi	L
8	1404081111840006	Ahmad Khusen	L
9	1404041009850005	Sairi	L
10	1404092907800001	Masrul Arfian	L
11	1404092411860003	Heriyandi	L
12	2105015808790002	Ema Damayanti	P
13	1404091112810001	Fadli	L
14	1404090804830002	Fakhrizal	L
15	1404112707880000	Mursit	L
16	1404066809920001	Denty Andriani	P
17	140403107840015	M. Arsyad	L
18	1404132006900002	Juliansyah	L
19	1404033009850001	Taufik	L
20	1404012207930001	Heri Siswoyo	L
21	1402113112870007	Muhammad Sa'at	L
22	1404032504870001	Afriyandi	L
23	1404070810930005	Bujang Azmi	L
24	1404071211750001	Hasanudin	L
25	1404172810860002	Muhammad Jauhanul Muttaqin	L
26	1484171608840001	Masriadi Rizal	L
27	1404171504870000	Bambang Suwito	L
28	1404171010860000	Rika Asiandi	L
29	1404171601900000	Muhammad Syukron	L
30	1404172304910000	Mursalin	L
31	1404010603860001	Martin	L
32	1404011504830003	Asropil Muttaqin	L
33	21103070402901000	Zulkarnain	L
34	1404011707850002	Ali Usman	L
35	1404122208880003	Iwan	L
36	1404012409870002	Asnah	P
37	1404012207930001	Heri Siswoyo	L
38	1404012509930001	E. Denni Prima Putra	L
39	1405102807870004	Riadi	L

(1)	(2)	(3)	(4)
40	1404040508900002	M. Ferli Ghandi	L
41	6101030704870002	Riadi, ST	L
42	1404100901920001	Zulfahrin	L
43	1404100307930001	Angga Prasetya Putra	L
44	1404102208910001	Fahrizal	L
45	1404042610840001	Anwar Cam	L
46	1404162907860001	Rudi Kuswanto	L
47	1404070102930002	Zulsyahwani	L
48	14014160711770000	Sutanto	L
49	1404165204870000	Rina Purwanti	P
50	140410182920002	Ahmad Mulyadi	L
51	1404042001870003	Hendro Lisa	L
52	1404045905760002	Saripah Aini, SP	P
53	1404041705770002	Gatot Sugiarto	L
54	1404041011820003	Dedy Suryandana	L
55	1404134608820002	Yesi Suharti	P
56	1404046908900001	R. Nanda Iriani	P
57	1404092503830001	Mardoli	L
58	1404040301820005	Yuhardin, S.HI	L
59	1404054505890004	Anita Sri Murni	P

Sumber: Sekretariat P3MD Kabupaten Indragiri Hilir

Jumlah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 236 Desa. Pendamping lokal Desa di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 59 orang, sedangkan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Tembilahan Hulu berjumlah Satu Orang. Penulis mengambil kesempatan untuk meneliti di Kecamatan Tembilahan Hulu karna desa Pulau Palas berada di jalan lintas provinsi atau poros ekonomi masyarakat, kemudian desa sialang panjang berada di pelosok hutan, sedangkan Desa Sungai Intan ditempuh melalui Perairan. Menarik untuk diteliti bagaimana cara Pendamping Lokal Desa bisa mensinerjikan keempat desa yang letaknya sangat berjauhan tetapi ada dalam satu kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Tembilahan Hulu.

Namun dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan serta tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa pada Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir ini. Maka perlu di evaluasi dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pendamping lokal Desa dan mengidentifikasi kendala-kendala untuk mencari solusi dan alternatif perbaikan pelaksanaan tugas kepala desa tersebut. Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja pelaksanaan tugas pendamping lokal desa, terutama di tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, adapun fenomena Penulis temukan Kantor Kecamatan tembilahan Hulu dan Kantor Desa Pulau Palas adalah sebagai berikut:

1. Pendamping Lokal Desa didapati belum partisipatif dalam menyusun rencana pembangunan Desa sehingga status Pendamping Lokal Desa dipertanyakan
2. Belum terjalinnya hubungan kerjasama antardesa oleh Pendamping Lokal Desa

Berdasarkan dari latar belakang diatas, kita dapat mengetahui pentingnya Tugas Tenaga Pendamping Desa dalam memahami karakter dan permasalahan desa. Pendamping Desa yang ditugaskan harus benar-benar mengenal desa tersebut dalam semua aspek, sehingga dapat memaksimalkan pendampingan sesuai yang diharapkan. , maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian :

“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari fenomena dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

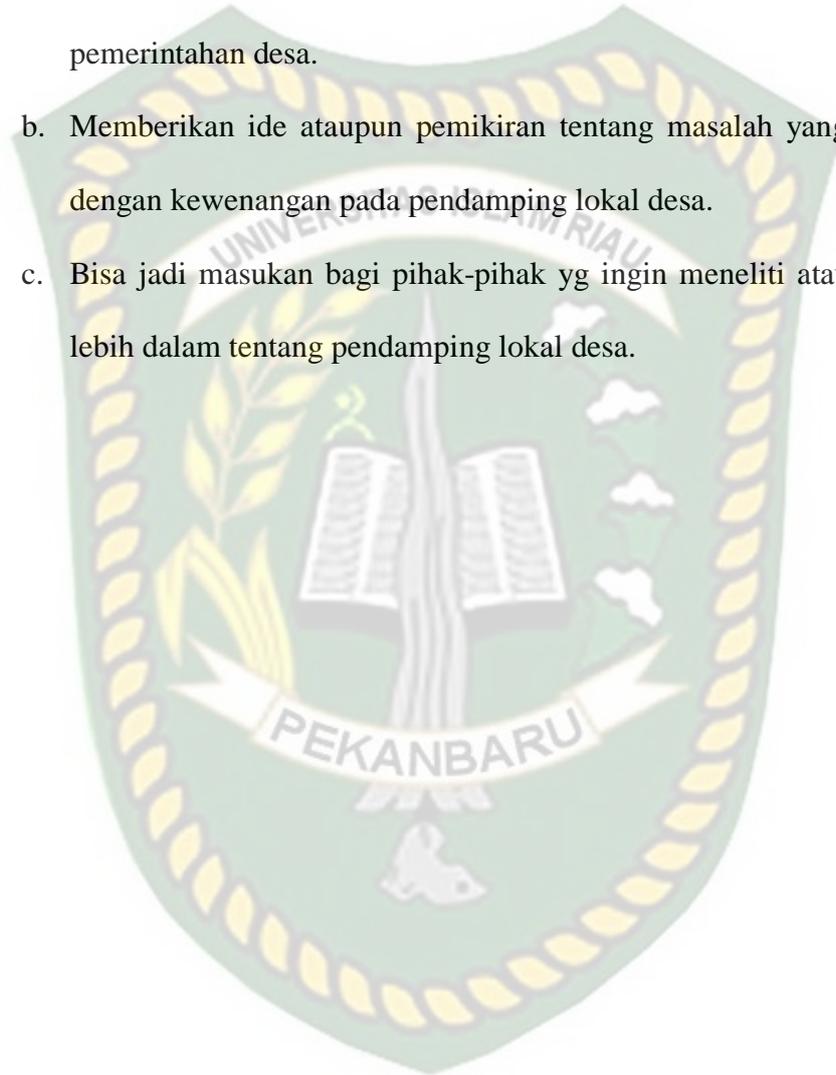
1. Bagaimana hasil Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa yg menjadi factor penghambat terhadap Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini semoga dapat berguna untuk memahami tentang wewenang pendamping lokal desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Memberikan ide ataupun pemikiran tentang masalah yang berkaitan dengan kewenangan pada pendamping lokal desa.
- c. Bisa jadi masukan bagi pihak-pihak yg ingin meneliti atau mengkaji lebih dalam tentang pendamping lokal desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisa data, diantaranya:

1. Konsep Pemerintahan

Dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Menurut Kansil (2003:18) pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan, pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah.. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005:7).

Ndraha (2005 : 70) mengatakan pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Ndraha mengatakan pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan *civil*.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1996:11) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Nurcholis, 2007:24).

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Pemerintah daerah juga diatur dalam UU. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada local government. Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal (Nurcholis, 2005:24).

Nurcholis (2007:26) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;

- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

3. Konsep Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga Makmur dan sejahtera secara relative merata (Budiman, 1995: 4).

Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hanif (2007:231) menyebutkan bahwa camat diangkat oleh bupati atau walikota atau usul sekretaris daerah. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Di samping menangani urusan otonomi daerah camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- A. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- B. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- C. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan;
- D. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- E. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- F. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- G. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan disebutkan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Untuk pembentukan kecamatan dilakukan melalui dua acara. Pertama, melalui pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih. Kedua, penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan lainnya yang bersandingan dalam suatu daerah kabupaten/kota menjadi kecamatan baru.

4. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Menurut Maria Eni Surasrih (2006) Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain - lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun Pengertian kepala desa Menurut Tahmit kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kepala desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Konsep Pelaksanaan Tugas

Menurut Siagian (2005;126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur (Sedarmayanti, 2007) meliputi:

- a. Prestasi kerja (*achievement*), yaitu hasil kerja individu dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
- b. Keahlian (*skill*), yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
- c. Perilaku (*attitude*), yaitu sikap dan tingkah laku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas²³ tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencakup kejujuran, tanggungjawab, dan disiplin.
- d. Kepemimpinan (*Leadership*), ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Menurut Siagian (2005;126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Kansil (2003;189), agar pelaksanaan tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka diperhatikan azaz-azaz yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni:

- a. Didasarkan pada kebijakan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit

6. Pendamping Desa

Pendamping desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan menurut pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen Desa PDT Trans) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional baik di Kabupten maupun Kecamatan serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping Desa, bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja

Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.

a. Syarat-syarat Pendamping Desa

Menurut pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- 1) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 2) Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- 3) Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- 4) Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- 5) Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Tugas Pendamping Lokal Desa

Tugas dan Fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan dana desa Penggunaan dana desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya, yaitu dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada dapat tercapai dengan sukses. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12 pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

- 1) Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa.
- 2) Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
- 3) Mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
- 4) Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.

c. Tujuan Pendamping Desa

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, tujuan pendampingan desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- 4) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

7. Konsep Evaluasi

Menurut Ndraha (2003;202) mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dan fakta dan analisis hasilnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya:

- a. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah before
- b. Model das solen das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur das solen
- c. Model kelompok kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Suharsimi Arikunto (2003), arti evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program pendidikan. Menurut Sajekti Rusi (1988), pengertian evaluasi adalah proses menilai sesuatu, yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik secara kuantitatif (pengukuran) maupun kualitatif (penilaian).

Menurut Dunn (2003;609) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti spesifik, evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Selanjutnya kriteria evaluasi menurut Dunn (2003;610) adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
- b. Efisiensi, yaitu seberapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Perataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
- e. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f. Ketepatan, yaitu apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

Peneliti dalam melakukan penelitian di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan model evaluasi das solen das sein karena lebih mudah melihat dan membandingkan bagaimana standar yang seharusnya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Suwardino (2014) Peranan Pendamping Desa Dalam Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	Membahas Tenaga Pendamping Desa	Jumlah sampel dan objek penelitian
2.	Fauzan Azim (2013) Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2011 Di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar	Membahas Tentang Dana Desa	Jumlah sampel dan objek penelitian
3.	Dede Ardian (2014) Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti	Membahas Tentang Pemberdayaan	Jumlah sampel dan objek penelitian

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir”



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Administrasi itu adalah proses kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, jadi tanpa adanya kerja sama suatu organisasi itu tidak dapat akan berjalan dengan baik.
2. Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.
4. Peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.
5. Pembangunan adalah suatu aktivitas yang sengaja direncanakan dan dilaksanakan, berarti pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh setiap negara, baik itu negara yang telah maju maupun negara – negara yang masih atau sedang berkembang.
6. Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan.
7. LPM merupakan lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh oleh dan untuk masyarakat desa, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha, 2003:201)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya sosialisasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya 2. Terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes 	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya koordinasi dengan pendamping Desa dan pihak terkait mengenai pembangunan Desa 2. Terfasilitasinya kerjasama antardesa 3. Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik 4. Terfasilitasinya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan desa 	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		Pemberdayaan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kader desa, masyarakat dan kelembagaan desa	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		Pemantauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa 2. Terlaksananya evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa 3. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa 	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, maka dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator sebagai berikut :

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada > 67-100%

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik atau berada 34-66%

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada < 1-33%

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan dan pembangunan keuangan Desa, dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada > 67-100%

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik atau berada 34-66%

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada < 1-33%

2. Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa, dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada > 67-100%

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik atau berada 34-66%

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada < 1-33%

3. Mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada > 67-100%

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik atau berada 34-66%

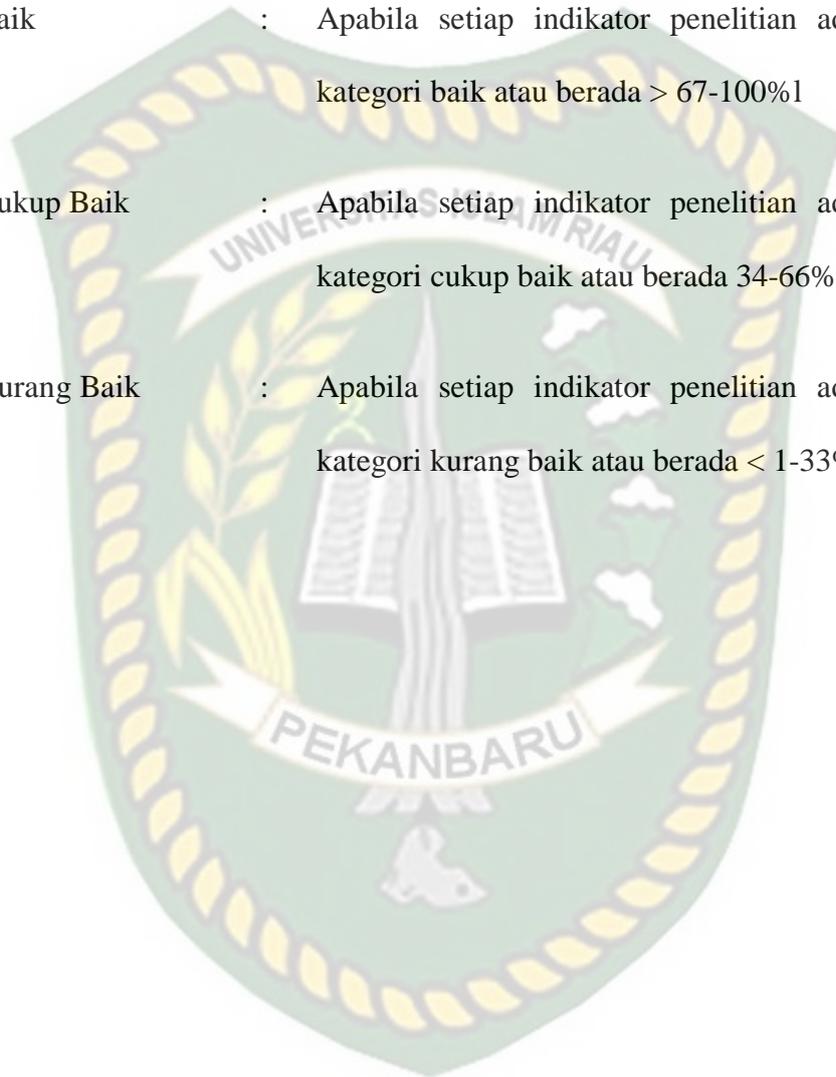
Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada < 1-33%

4. Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa, dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada > 67-100%

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik atau berada 34-66%

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada < 1-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe kuantitatif yang dideskriptifkan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Tipe penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian kuantitatif dapat lebih akurat dan terperinci.

Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Berbeda dengan penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7).

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Hadari Nawawi, 1991:63). Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan tentang bagaimanakah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif ialah karena sifat dari penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yaitu dalam konteks penelitian ini keadaan yang hendak digambarkan ialah mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dari Pendamping Lokal Desa. Selain itu pelaksanaan dari penelitian ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data semata, tetapi juga menganalisis, mengamati suatu fenomena atau peristiwa secara terperinci sehingga dapat menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Palas yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena badan ini merupakan badan penggerak dalam melakukan pembangunan khususnya pada Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Effendy (2010 : 101) menyatakan bahwa populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek atau pariwisata yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian.

2. Sampel

Menurut Effendy (2010 : 102) menyatakan bahwa sampel adalah penggambaran dari suatu populasi dengan ukuran yang dapat diukur, sampel dikumpulkan dan dihitung dengan statistik, seorang peneliti dapat membuat kesimpulan dan ekstrapolasi dari sampel dalam suatu populasi.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel tentang Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jabatan	Populasi	Sampel	%
1	Pendamping Lokal Desa	1	1	100%
2	Pendamping Desa	1	1	100%
3	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur	1	1	100%
4	Koordinator Kabupaten P3MD	5	1	20%
5	Camat Tembilahan Hulu	1	1	100%
6	Kepala Desa Pulau Palas	1	1	100%
7	BPD	9	1	11%
8	LPM	5	1	20%
	Jumlah	24	8	-

Sumber: Olahan Data, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif dapat dijangkau, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil sampel dari populasi. Sehingga teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Koordinator Kabupaten P3MD, Camat Tembilahan Hulu, Kepala Desa Pulau Palas, BPD, dan LPM di Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir digunakan teknik *purposive sampling*, dimana orang yang langsung mengikuti peranan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Pulau Palas yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu dan Pendamping Lokal Desanya adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan dapat juga berupa:
 1. Keadaan Geografis
 2. Gambaran umum Kecamatan Tembilahan Hulu
 3. Jumlah Penduduk
 4. Sosial Budaya
 5. Ekonomi / Mata Pencaharian

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian dan fenomena sesungguhnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

- b. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarakan kepada responden yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

d. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999:149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020																				
		Maret				April				Juni				Agustus				Januari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuissioner																					
5	Rekomendasi Survay																					
6	Survay Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Peneltian (Skripsi)																					
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																					
10	Ujian Skripsi																					
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																					
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																					

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusunan skripsi ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika bab-sub bab penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini merupakan penjabaran dari studi kepustakaan dan dilanjutkan dengan kerangka pikir, konsep operasional dan operasionalisasi variabel dan teknik pengukuran.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisi tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, jadwal kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembilahan Hulu)

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan diberikan saran atas temuan tersebut.

Tabel III.3: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	2	6	7
1.	Suwardino (2014) Peranan Pendamping Desa Dalam Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	Membahas Tenaga Pendamping Desa	Jumlah sampel dan objek penelitian
2.	Fauzan Azim (2013) Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2011 Di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar	Membahas Tentang Dana Desa	Jumlah sampel dan objek penelitian
3.	Dede Ardian (2014) Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti	Membahas Tentang Pemberdayaan	Jumlah sampel dan objek penelitian

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah dan geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 00 36' Lintang Utara dan 10 07' Lintang Selatan, dan antara 1040 10'–1020 32' Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Pelalawan; Selatan – Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi); Barat - Kabupaten Indragiri Hulu; Timur - Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan, yaitu: Kecamatan Keritang, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Reteh, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Concong, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Kempas, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Gaung, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kateman, Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Pulau Burung.

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya

adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

2. Letak Wilayah dan Geografis Kecamatan Tembilahan Hulu

Tembilahan Hulu adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tembilahan berdasarkan *SK Gubernur Riau tanggal 14 Agustus 1999 Nomor: Kpts.402.a/VIII/1999* dengan ibukota Kelurahan Tembilahan Hulu. Pada awalnya Kecamatan Tembilahan Hulu terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa. Kemudian pada Tahun 2011 berubah menjadi 2 kelurahan dan 4 desa.

Luas wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu adalah 183,60 Km². Wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Tempuling
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Tembilahan

Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Keadaan tanah seperti ini menyebabkan masyarakat yang membangun tempat tinggal harus berupaya dengan berbagai proses untuk memadatkan tanah sebelum dibangun rumah permanen (dinding tembok). Keadaan air pasang surut yang sering terjadi menyebabkan masyarakat di

Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya dan Kecamatan Tembilahan Hulu pada khususnya lebih memilih membangun rumah panggung.

Di Kecamatan Tembilahan Hulu banyak terdapat hewan *reptile* biawak sebagaimana di kecamatan lain di kabupaten ini. Daerah pinggiran sungainya banyak ditumbuhi pohon nipah. Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah. Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah. Pada Tahun 2016, curah hujan tertinggi di Kecamatan Tembilahan Hulu terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 231 mm (hari hujan 20 hari) dan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 20 mm. Namun jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 23 hari dan yang paling sedikit adalah pada bulan Juni sebesar 6 hari.

B. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 722.234 jiwa yang terdiri atas 370.603 jiwa penduduk laki-laki dan 351.631 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,40. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan yaitu 76.122 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang yaitu 12.763 jiwa.

**Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Tembilahan Hulu, 2016 dan 2017**

Desa/Kelurahan		Jumlah		Jumlah Rumah	
		Penduduk		Tangga	
		2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Desa					
1.	Pulau Palas	6243	6331	1487	1506
2.	Sialang Panjang	2899	2940	722	732
3.	Pekan Kamis	1248	1266	303	306
4.	Sungai Intan	3174	32220	722	732
Kelurahan					
1.	Tembilahan Hulu	26509	26888	6010	6087
2.	Tembilahan Barat	6189	6276	1935	1960
Total		46262	46921	11179	11323

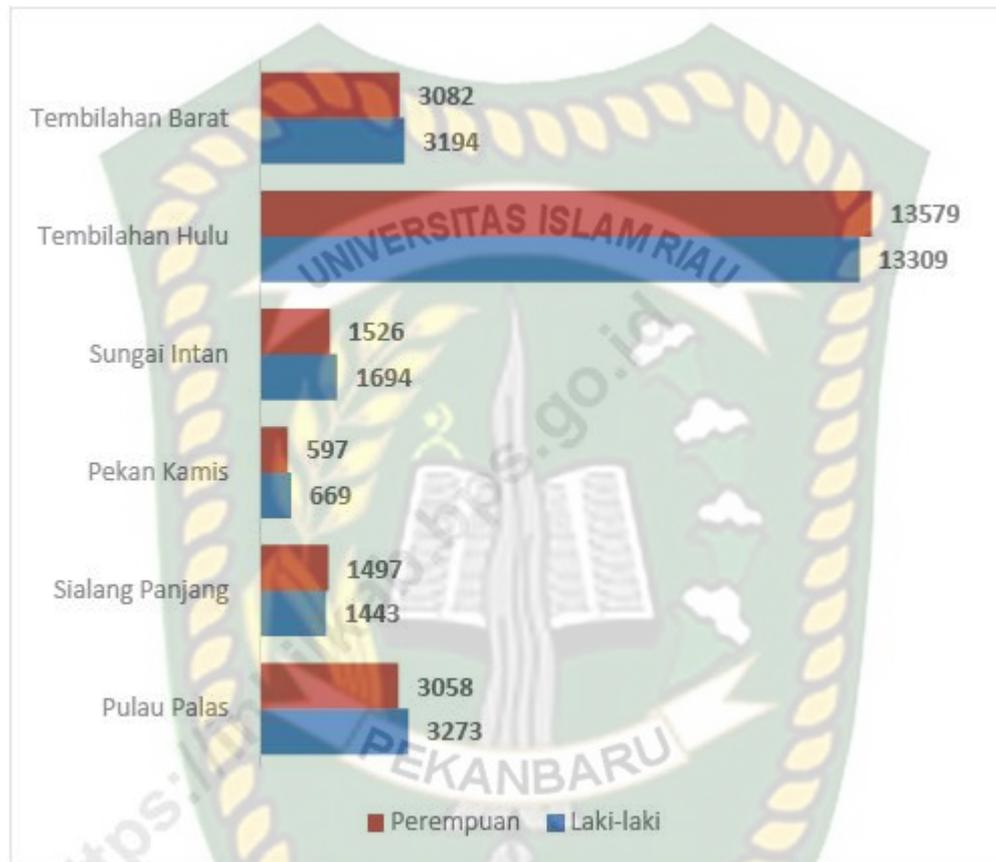
Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Indragiri Hilir

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus

menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2016 adalah 46.262 jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 11.179 rumah tangga. Jumlah Penduduk Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan terbesar keempat se-Kabupaten Indragiri Hilir setelah Kecamatan Tembilahan, Keritang, dan Kateman. Desa/kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Tembilahan Hulu yakni 26.509 jiwa. Desa yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Pekan Kamis yakni hanya 1.248 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan sex ratio sebesar 101. Berarti setiap 100 penduduk perempuan juga terdapat 101 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki yaitu 23.251 jiwa dan penduduk perempuan 23.011 jiwa.

Jumlah Penduduk Menurut Desa Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tembilahan Hulu, 2017



C. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai seseorang memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik. Kecamatan Tembilahan Hulu memiliki 39 sarana pendidikan yang tersebar di 6 desa/kelurahan, terdiri atas 25 SD/MI, 9

SMP/MTs, dan 5 SMA/SMK/MA. Selain sekolah Kecamatan Tembilahan juga memiliki Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari 17 Kelompok Bermain, 4 Taman Kanak-kanak, 2 Raudathul Athfal, dan 1 Taman Penitipan Anak. Jumlah murid pada tahun 2016 mencapai 11.726 orang dan guru 912 orang.

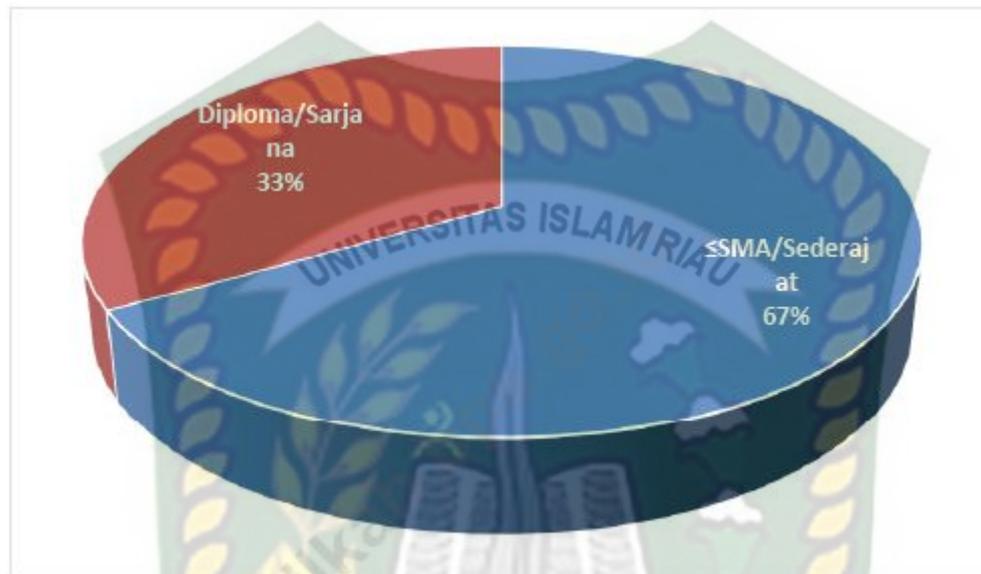
Kesehatan

Hampir di setiap desa/kelurahan sudah memiliki fasilitas kesehatan yaitu puskesmas atau puskesmas pembantu. Puskesmas berada di Ibukota Kecamatan Tembilahan Hulu yaitu Kelurahan Tembilahan Hulu. Puskesmas ini adalah puskesmas rawat inap. Sedangkan desa/kelurahan lainnya masing-masing memiliki satu puskesmas pembantu.

D. Keadaan Pemerintahan

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat agar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Pemerintah Kecamatan Tembilahan Hulu telah membentuk dan menata kembali susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Tembilahan Hulu berdasarkan struktur organisasi pola minimal sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kantor Camat Tembilahan Hulu, 2017



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, sesuai struktur Camat Tembilahan Hulu dibantu oleh Sekretaris Camat, 2 Kasi (Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan) dengan 6 Kasubsi dan 2 Kaur serta beberapa Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu.

Dengan adanya pemekaran desa dan kelurahan pada Tahun 2011, maka jumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu berubah menjadi 2 kelurahan dan 4 desa yaitu :

1. Kelurahan Tembilihan Hulu dan Kelurahan Tembilihan Barat (Pemekaran Kelurahan Tembilihan Hulu)
2. Desa Sialang Panjang
3. Desa Pekan Kamis
4. Desa Pulau Palas
5. Desa Sungai Intan (Pemekaran Desa Pulau Palas)

Jumlah Dusun, RT, dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilihan Hulu, 2017

Desa/Kelurahan		Dusun	RT	RW
(1)		(2)	(3)	(4)
Desa				
1.	Pulau Palas	5	27	10
2.	Pekan Kamis	1	5	1
3.	Sialang Panjang	4	33	10
4.	Sungai Intan	5	22	10
Kelurahan				
1.	Tembilihan Hulu		60	17
2.	Tembilihan Barat		20	10
Tembilihan Hulu		15	167	58

Sumber: Kantor Camat Tembilihan Hulu

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, terlebih dahulu penulis memaparkan beberapa dari identitas responden. Pendapat responden digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan pada akhirnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Responden yang penulis paparkan meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan mata pencaharian sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman responden tersebut. Adapun identitas responden dari responden penelitian tersebut:

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku responden dalam menghadapi suatu pekerjaan dan perkembangan perekonomian, dimana seorang pria lebih cepat daripada wanita, begitu juga wanita biasanya bekerja lebih rapi daripada pria dalam menentukan hasil dari pekerjaan, keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan, oleh karena itu diharapkan agar keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi kekurangan sehingga terbentuk tim kerja yang solid dan dapat tercapai. Jenis kelamin

juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan, dimana pria biasanya lebih cepat emosional daripada wanita perbedaan emosional dapat mempengaruhi hasil dari sebuah pekerjaan.

Untuk lebih jelas mengenai jenis responden yang ada pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1: Distribusi jumlah responden menurut jenis kelamin mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Pria	7	87,5
2	Wanita	1	12,5
	Jumlah	8	100

Sumber: Data Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa untuk jumlah responden menurut jenis kelamin mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari Pria sebanyak 7 orang atau sama dengan 87,5% dan Wanita sebanyak 1 orang atau sama dengan 12,5%. Dari tabel diatas diharapkan kepada Pendamping Lokal Desa mampu berkerja sama dengan pihak terkait dalam keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Pulau Palas.

2. Umur

Tingkat umur seseorang sangat mempengaruhi orang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan. Hal ini tidak terkecuali bagi pihak terkait yang berkerja sama dengan Pendamping Lokal Desa dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yang termasuk responden penelitian, karena secara teoritis umur seseorang mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukannya.

Lebih dari kematangan pola pikir dalam usia seseorang yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sangat diperlukan untuk melaksanakan setiap pekerjaan dan tugas yang telah dibebankan.

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, maka diketahui bahwa tingkat umur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.2: Distribusi jumlah Responden menurut umur Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	21-30	1	12,5
2	31-40	3	37,5
3	41-50	2	25
4	51 keatas	2	25
	Jumlah	8	100

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel diatas terlihat responden yang berada pada rentang umur antara 21-30 tahun berjumlah 1 orang responden dengan persentase 12,5%, responden yang berada pada rentang umur antara 31-40 tahun berjumlah 3 orang responden dengan persentase 37,5%, responden yang berada pada rentang umur anatar 41-50 tahun berjumlah 2 orang responden dengan persentase 25%, dan responden yang berada pada umur 51 tahun keatas berjumlah 2 orang responden dengan persentase 25%.

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa perangkat yang terlibat dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, didominasi oleh orang yang berusia 31-40 tahun. Pada umur tersebut merupakan umur dengan tingkat kematangan dalam berfikir dalam kondisi tertekan serta berani mengambil resiko pekerjaan. Dengan ini diharapkan responden penelitian ini dapat melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan peraturan tugas peraturan daerah, serta

dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif dan efisien.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan suatu usaha guna memberikan pengembangan terhadap pola pikir seseorang dalam memahami dan menilai suatu keadaan atau kondisi, dimana dari tingkat pendidikan seseorang dapat mengetahui kemampuan dirinya dan orang lain.

Tingkat pendidikan seseorang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku seseorang mengenai tingkat pendidikan dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3: Distribusi Responden menurut tingkat pendidikan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SLTA	2	25
2	Diploma	0	0
3.	Strata 1	5	62,5
4	Strata 2	1	12,5
	Jumlah	8	100

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan responden yang terlibat dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tingkat pendidikan SLTA

sebanyak 2 orang atau sama dengan 25%, untuk tingkat pendidikan Diploma sebanyak 0 orang atau sama dengan 0%, untuk tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 5 orang atau sama dengan 62,5%, dan begitu juga untuk tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 1 orang atau sama dengan 12,5%.

Dari uraian diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh lulusan Srata 1, walaupun demikian diharapkan para responden penelitian ini pada lulusan tersebut mampu berkerja secara baik dalam menjalankan tugasnya dan peran aktif dalam tugas apapun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil dan Pembahasan Data Indikator

Untuk Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dilihat pada indikator berikut ini:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pemberdayaan
- d. Pemantauan

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cakupan pencapaian. Merencanakan berarti mengupayakan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi atau program tata cara pelaksanaan program dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.

Dapat diartikan juga perencanaan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, dengan demikian proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Perencanaan disini sangatlah penting dimana Pendamping Lokal Desa dengan pihak terkait yaitu Pemerintah Desa melakukan proses perencanaan pembangunan yang nantinya akan dijadikan acuan untuk proses pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk lebih jelasnya melihat tugas Pendamping Lokal Desa dalam indikator Perencanaan dapat dilihat pada Lembar Bimbingan Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Riau berikut ini:

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LEMBAR BIMBINGAN

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL P3MD PROVINSI RIAU

Kabupaten:

Kecamatan:

Hari/ Tanggal	Waktu		Desa	Isi Bimbingan	Unsur Yang Dibimbing		Tanda Tangan
	Mulai	Selesai	Pulau Palas		Nama	Jabatan	
Senin, 18 februari 2019				Menyampaikan rancangan dari program arahan dan Dana APBDes	Dodi Wahyudi, ST	Sekretaris Desa	

Dibuat oleh

TPP P3MD Provinsi Riau

Asnah

Pendamping Lokal Desa

Data diatas merupakan lembar kerja atau lembar bimbingan Tenaga Pendamping Lokal Desa kepada Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Riau yang menjelaskan tentang bagaimana Pendamping Lokal Desa bekerja melaksanakan tugasnya dalam memfasilitasi musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes kepada Sekretaris Desa pada saat itu

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Desa dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4: Distribusi tanggapan responden terhadap indikator Perencanaan oleh Pendamping Lokal Desa pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Terlaksananya sosialisasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya	8	-	-	8
2	Terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes	8	-	-	8
	Jumlah	16			16
	Rata-Rata	8			8
	Persentase	100%			100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut, pada indikator Perencanaan oleh pendamping lokal desa dapat dijelaskan beberapa jenis

pertanyaan yang menerangkan indikator terlaksananya sosialisasi Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes.

Untuk pertanyaan pertama ialah terlaksananya sosialisasi Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya ialah seberapa besar peran aktif responden dan pemahaman tentang pelaksanaan tugas pendamping lokal Desa, maksud dan tujuan dari indikator perencanaan yang akan disosialisasikan kepada para koordinator dan untuk selanjutnya digunakan pada petugas lapangan untuk kegunaan pada masyarakat, tanggapan responden terhadap pertanyaan dari perencanaan dalam terlaksananya sosialisasi Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan turunannya sebanyak 8 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 100%. Hal ini dapat diambil kesimpulan kegiatan tersebut sangat terlaksana dengan kategori “baik”.

Jenis pertanyaan kedua ialah Terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes. Setelah dinilai situasi desa melalui musyawarah maka dari berbagai perencanaan dapat dipilih atau diidentifikasi untuk dapat dilanjutkan kepada Masyarakat. Tanggapan Responden terhadap pertanyaan Terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes ialah sebanyak 8 orang responden yang menyatakan baik atau sama dengan 100%. Hal ini dapat diambil kesimpulan kegiatan tersebut sangat terlaksana dengan kategori “baik”.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah implementasi atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah terperinci, yang mana dilakukan setelah perencanaan dianggap selesai. Pelaksanaan merupakan fungsi yang mendasar, dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang dalam organisasi.

Pelaksanaan pembangunan sangatlah penting demi kepentingan masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan Desa yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan Desa dalam segala aspek yang berpotensi memajukan Desa tersebut.

Untuk lebih jelasnya melihat tugas Pendamping Lokal Desa dalam indikator Pelaksanaan dapat dilihat pada Lembar Bimbingan Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Riau berikut ini:

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LEMBAR BIMBINGAN

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL P3MD PROVINSI RIAU

Kabupaten:

Kecamatan:

Hari/ Tanggal	Waktu		Desa	Isi Bimbingan	Unsur Yang Dibimbing		Tanda Tangan
	Mulai	Selesai	Pulau Palas		Nama	Jabatan	
Kamis, 28 februari 2019				Rapat kerja bersama Kades dan Sekdes Desa Pulau Palas mengenai percepatan pelaksanaan pembangunan 2019	Arifin, S.Ag Dodi Wahyudi, ST	Kepala Desa Sekretaris Desa	

Dibuat oleh

TPP P3MD Provinsi Riau

Asnah

Pendamping Lokal Desa

Data diatas merupakan lembar kerja atau lembar bimbingan Tenaga Pendamping Lokal Desa kepada Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Riau yang menjelaskan tentang bagaimana Pendamping Lokal Desa bekerja melaksanakan tugasnya memfasilitasi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik bersama dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada saat itu. Kita dapat melihat dari data diatas bahwa

Pendamping Lokal Desa berusaha untuk menjalankan tugasnya agar terjalannya koordinasi dengan Pendamping Lokal Desa dengan pihak terkait yaitu Pemerintah Desa mengenai pembangunan Desa dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan atau kendala yg akan dihadapi saat dilapangan Untuk mengetahui apa saja yg menjadi tanggapan responden terhadap indikator Pelaksanaan kita dapat melihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5: Distribusi tanggapan responden terhadap indikator Pelaksanaan oleh Pendamping Lokal Desa pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya koordinasi dengan Pendamping Desa dan Pihak terkait mengenai pembangunan desa	4	3	1	8
2	Terfasilitasinya kerjasama antardesa	3	2	3	8
3	Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik	5	2	1	8
4	Tersafilitasinya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan desa	4	1	3	8
	Jumlah	16	8	8	32
	Rata-rata	4	2	2	8
	Persentase	50%	25%	25%	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut, pada indikator pelaksanaan oleh pendamping lokal Desa dapat dijelaskan ada beberapa jenis pertanyaan yang menerangkan indikator yaitu adanya koordinasi dengan pendamping Desa dan pihak terkait mengenai pembangunan Desa, terfasilitasinya kerjasama antardesa, terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, tersafilitasinya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan desa.

Untuk pertanyaan pertama ialah adanya koordinasi dengan pendamping Desa dan pihak terkait mengenai pembangunan Desa ialah pendamping lokal desa melaksanakan tugasnya bersama dengan pihak terkait dan berkoordinasi. Bagaimana pemahaman responden mengenai indikator pelaksanaan, maksud dan tujuan dalam pelaksanaan menentukan kualitas maupun kuantitas dan tanggung jawab baik dari pelayanan, pelaksanaan, serta kemampuan dalam mengelola program tersebut agar program tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai tepat sasaran untuk kegunaan pada masyarakat. Tanggapan responden terhadap pertanyaan adanya koordinasi dengan pendamping Desa dan pihak terkait mengenai pembangunan Desa sebanyak 4 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 50%, dan 3 orang responden menyatakan cukup baik atau sama dengan 25%, dan 1 orang responden menyatakan kurang baik atau sama dengan 25%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan pendamping Desa dan pihak terkait mengenai pembangunan Desa adalah “baik”.

Jenis pertanyaan kedua ialah Terfasilitasnya kerjasama antardesa dalam indikator pelaksanaan. Tanggapan responden terhadap pertanyaan Terfasilitasnya kerjasama antardesa yaitu, sebanyak 3 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 50%, 2 orang responden menyatakan cukup baik atau sama dengan 25%, dan 3 orang responden menyatakan kurang baik atau sama dengan 25%. Mengenai tanggapan responden tentang terfasilitasnya kerjasama antardesa dalam indikator pelaksanaan adalah “cukup baik”.

Jenis pertanyaan ketiga ialah terfasilitasnya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam indikator pelaksanaan. Tanggapan responden terhadap pertanyaan terfasilitasnya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik yaitu, sebanyak 5 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 50%, dan 2 orang responden menyatakan cukup baik atau sama dengan 25%, dan 1 orang responden menyatakan kurang baik atau sama dengan 25%. Mengenai tanggapan responden tentang terfasilitasnya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik adalah “baik”.

Jenis pertanyaan keempat ialah tersafilitasnya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan desa dalam indikator pelaksanaan. Tanggapan responden terhadap pertanyaan tersafilitasnya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan desa yaitu, sebanyak 4 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 50%, dan 1 orang responden

Data diatas merupakan lembar kerja atau lembar bimbingan Tenaga Pendamping Lokal Desa kepada Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Riau yang menjelaskan tentang bagaimana Pendamping Lokal Desa bekerja melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kader desa, masyarakat, dan kelembagaan desa bersama dengan Kepala Urusan Ekonomi di Desa Pulau Palas pada saat itu.

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

Untuk mengetahui apa saja yg menjadi tanggapan responden terhadap indikator Pemberdayaan kita dapat melihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6: Distribusi tanggapan responden terhadap pemberdayaan oleh Pendamping Lokal Desa pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kader desa, masyarakat dan kelembagaan desa	3	5	-	8
	Jumlah	3	5		8
	Rata-rata	3	5		8
	Persetase	37,5%	62,5%		100%

Dari tabel diatas pada indikator pemberdayaan oleh Pendamping Lokal Desa ada satu pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu, terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kader desa, masyarakat dan kelembagaan desa yaitu, sebanyak 3 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 37,5%, sebanyak 5 orang responden menyatakan cukup baik atau sama dengan 62,5%. Mengenai tanggapan responden tentang terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kader desa, masyarakat dan kelembagaan desa “cukup baik”.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, sejauh mana kendala dan hambatan ditemui, dan

bagaimana upaya-upaya yang sudah dan harus ditempuh untuk mengatasi kendala dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan program.

Pemantauan juga menyangkut pada pengukuran dan penilaian kinerja, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan baik secara kualitas dan kuantitas dengan efektif. Pada dasarnya fokus dari pemantauan adalah masukan dan proses pelaksanaan sekaligus kontribusi faktor-faktor terkait terhadap hasil secara kualitas dan kuantitas, kerjasama, proses pengambilan keputusan dan kebijakan, advokasi dan koordinasi.

Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Untuk lebih jelasnya melihat tugas Pendamping Lokal Desa dalam indikator Pemantauan dapat dilihat pada Lembar Bimbingan Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Riau berikut ini:

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LEMBAR BIMBINGAN

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL P3MD PROVINSI RIAU

Kabupaten:

Kecamatan:

Hari/ Tanggal	Waktu		Desa	Isi Bimbingan	Unsur Yang Dibimbing		Tanda Tangan
	Mulai	Selesai	Pulau Palas		Nama	Jabatan	
Jum'at, 28 februari 2019				Rapat kerja bersama BPD Desa Pulau Palas mengenai pemantauan pembangunan dan musyawarah Desa	Syariful Anam	Ketua BPD	

Dibuat oleh

TPP P3MD Provinsi Riau

Asnah

Pendamping Lokal Desa

Data diatas merupakan lembar kerja atau lembar bimbingan Tenaga Pendamping Lokal Desa kepada Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Riau yang menjelaskan tentang bagaimana Pendamping Lokal Desa bekerja melaksanakan tugasnya dalam memfasilitasi desa dalam peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan

Desa melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa dan melibatkan BPD dan jajaranya beserta juga masyarakat Desa Pulau Palas.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator Pemantauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7: Distribusi tanggapan responden terhadap indikator Pemantauan oleh Pendamping Lokal Desa pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang baik	
1	Terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa	5	2	1	8
2	Terlaksananya evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa	6	2	-	8
3	Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa	7	-	1	8
	Jumlah	18	4	1	24
	Rata-rata	6	1	1	8
	Persentase	75%	12,5	12,5	100%

Dari tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut, pada indikator pemantauan oleh pendamping lokal Desa dapat dijelaskan ada beberapa jenis pertanyaan yang menerangkan indikator yaitu terlaksananya peningkatan

kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa, terlaksananya evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa.

Untuk pertanyaan pertama ialah terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa yaitu, sebanyak 5 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 75%, sebanyak 2 orang responden menyatakan cukup baik atau sama dengan 12,5%, sebanyak 1 orang responden menyatakan kurang baik atau sama dengan 12,5%. Mengenai tanggapan responden tentang terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa adalah “baik”.

Jenis pertanyaan kedua ialah terlaksananya evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa yaitu, sebanyak 6 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 75%, sebanyak 2 orang responden menyatakan cukup baik atau sama dengan 12,5%. Mengenai tanggapan responden tentang terlaksananya evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa adalah “baik”.

Jenis pertanyaan ketiga ialah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa yaitu, sebanyak 7 orang responden menyatakan baik atau sama dengan 75%, sebanyak 1 orang responden menyatakan kurang baik atau sama dengan 12,5%. Mengenai tanggapan

responden tentang masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa adalah “baik”.

5. Melakukan wawancara dengan key informan yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Keberhasilan pembangunan disuatu daerah atau Desa atau nama lain dapat dinilai dari adanya keselarasan atau terciptanya komunikasi yang baik, dengan itu hubungan antara Pemerintah Desa dan Pendamping Lokal Desa menjadi salah satu tolak ukur konsep yang mampu bekerja sama yang lebih meningkatkan dari suatu program yang didasari hubungan komunikasi lebih baik oleh Pemerintah Desa terhadap Pendamping Lokal Desa dan juga Masyarakat di Desa Pulau Palas dapat membina hubungan yang akrab dan harmonis terbuka.

Untuk melihat lebih jelas hasil wawancara terhadap yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.8: Distribusi penilaian responden tentang wawancara terhadap yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Wawancara mengenai hambatan dalam merencanakan pembangunan	3			3
2	Wawancara partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan	2	1		3
3	Wawancara mengenai peran aktif dalam kegiatan pemberdayaan		2	1	3
4	Wawancara mengenai evaluasi pembangunan	2	1		3
	Jumlah	7	4	1	12
	Persentase	58,3%	33,3%	8,3%	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat dilihat bahwa hasil responden penelitian tentang mengenai indikator wawancara dengan key informan yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun pertanyaan pertama

yaitu wawancara mengenai hambatan dalam merencanakan pembangunan, untuk kategori baik yang dinyatakan oleh 2 orang responden atau 58,3%. Adapun alasan responden memberikan tanggapan baik dari wawancara mengenai hambatan dalam merencanakan pembangunan adalah karena Pendamping Lokal Desa sudah bekerja dengan sangat baik dalam ikut dalam proses perencanaan pembangunan, selalu datang pada rapat yang dilakukan Pemerintah Desa Pulau Palas maupun Pemerintah Kecamatan Tembilahan Hulu.

Adapun pertanyaan kedua mengenai Wawancara partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan pada kategori “Baik” yang dinyatakan oleh 2 orang responden atau 58,3%. Adapun alasan responden memberikan tanggapan baik adalah Kepala Desa Pulau palas memberikan arahan dan tujuan pembangunan di desa dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal Desa melakukan diskusi untuk mengetahui permasalahan apa saja yang harus dihadapi dalam pembangunan, kemudia menjalankan tugasnya demi kemajuan Desa tersebut.

Selanjutnya pertanyaan ketiga mengenai peran aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang menyatakan kategori “cukup baik” yang dinyatakan oleh 2 orang responden atau 33,3%. Adapun alasan responden memberikan tanggapan cukup baik karena Pendamping Lokal Desa kurang pendekatan emosional terhadap masyarakat secara persuasive dan juga dipengaruhi oleh adanya kesibukan dari Pendamping Lokal Desa. Dalam melakukan

pemberdayaan Pendamping Lokal Desa kurang berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik.

Dan untuk pertanyaan terakhir wawancara mengenai pemantauan evaluasi pembangunan pada kategori “Baik” yang dinyatakan oleh 2 orang responden atau sama dengan 58,3%. Adapun alasan responden memberikan tanggapan “baik” adalah dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pulau Palas, Pendamping Lokal Desa dan pihak terkait selalu melakukan pemantauan saat proses pembangunan sedang berjalan. Pendamping Lokal Desa selalu berkesempatan hadir pada objek-objek pembangunan yg sedang berjalan, melihat situasi, dan melakukan evaluasi bila terdapat hambatan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa key informan yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh informasi bahwa: “Sejauh ini proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan juga evaluasi adalah baik, namun dalam hal pemberdayaan serta persiapannya perlu diberikan focus lebih kepada pendekatan terhadap masyarakat yang ada pada Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir ini.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, pelaksanaan tugas Pendamping Lokal Desa sudah terlaksana dengan baik dan Pendamping Lokal Desa juga bisa menampung aspirasi masyarakat, sehingga dalam

melaksanakan tugas-tugasnya Pendamping Lokal Desa terlihat sangat percaya diri akan kemampuannya.

Dari analisis data kuisioner dapat dilihat kesimpulan terkait pelaksanaan tugas Pendamping Lokal Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori “Baik”.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berikut ini penulis akan tampilkan rekapitulasi hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan tugas Pendamping Lokal Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel V.8: Rekapitulasi tanggapan responden tentang penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan	8	-	-	8
2	Pelaksanaan	4	2	2	8
3	Pemberdayaan	3	5	-	8
4	Pemantauan	6	1	1	8
	Jumlah	21	8	3	32
	Rata-rata	5	2	1	8
	Persentase	62,5%	25%	12,5%	100%

Sumber: Data olahan lapangan 2019

Berdasarkan tabel V.8 rekapitulasi data diatas diketahui tanggapan responden penelitian untuk 4 indikator mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dijelaskan bahwa menyatakan kategori “Baik” berjumlah 21 dan rata-rata 5 orang atau 62,5%. Sedangkan yang menyatakan kategori “Cukup Baik” berjumlah 8 dan rata-

rata 2 orang atau 25%. Kemudian yang menyatakan untuk kategori “Kurang Baik” berjumlah 3 orang atau 12,5%.

Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir “Baik” dengan jumlah 21 dan rata-rata 5 orang atau 62,5%.

C. Hambatan-hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir perlu penanganan oleh Pemerintah adalah:

1. Kurangnya pemahaman perangkat desa akan tugas-tugas Pendamping Lokal Desa
2. Pendamping Lokal Desa sangat susah untuk ditemui karna Pendamping Lokal Desa tidak memiliki kantor atau tempat resmi untuk berkerja dan tidak adanya sistem jam kerja.
3. Pendampingan dalam pengelolaan dana desa belum dilaksanakan dengan keterbukaan maksimal.
4. Pendamping Lokal Desa kurang memahami tugas dan fungsinya.

5. Rendahnya kemampuan yang di miliki oleh Pendamping Lokal Desa dalam membina Kepala Desa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
6. Kurangnya pengetahuan Pendamping Lokal Desa mengenai administrasi serta Pendamping Lokal Desa tidak mengetahui cara pencairan dana desa.
7. Pendamping Desa hanya sibuk menyusun laporan kerjanya.
8. Pendamping Lokal Desa juga mempunyai kesibukan pekerjaan lain
9. Kurangnya koordinasi antara Pendamping Lokal Desa dengan pihak kecamatan sehingga membuat sulit orang lain yg ingin berurusan
10. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa kurang memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LEMBAR BIMBINGAN

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL P3MD PROVINSI RIAU

Kabupaten:

Kecamatan:

Hari/ Tanggal	Waktu		Desa	Isi Bimbingan	Unsur Yang Dibimbing		
	Mulai	Selesai	Pulau Palas		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Senin, 17 februari 2019				Menyampaikan rancangan dari program arahan dan Dana APBDes	Dodi Wahyudi, ST	Sekretaris Desa	

Dibuat oleh

TPP P3MD Provinsi Riau

Asnah

Pendamping Lokal Desa

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LEMBAR BIMBINGAN

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL P3MD PROVINSI RIAU

Kabupaten:

Kecamatan:

Hari/ Tanggal	Waktu		Desa	Isi Bimbingan	Unsur Yang Dibimbing		
	Mulai	Selesai	Pulau Palas		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Jum'at, 28 februari 2019				Rapat kerja bersama Kades dan Sekdes Desa Pulau Palas mengenai percepatan pelaksanaan pembangunan 2019	Arifin, S.Ag Dodi Wahyudi, ST	Kepala Desa Sekretaris Desa	

Dibuat oleh

TPP P3MD Provinsi Riau

Asnah

Pendamping Lokal Desa

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LEMBAR BIMBINGAN

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL P3MD PROVINSI RIAU

Kabupaten:

Kecamatan:

Hari/ Tanggal	Waktu		Desa	Isi Bimbingan	Unsur Yang Dibimbing		
	Mulai	Selesai	Pulau Palas		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Jum'at, 28 februari 2019				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulau Palas	Sri Wahyuni	Kaur Ekonomi	

Dibuat oleh

TPP P3MD Provinsi Riau

Asnah

Pendamping Lokal Desa

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LEMBAR BIMBINGAN

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL P3MD PROVINSI RIAU

Kabupaten:

Kecamatan:

Hari/ Tanggal	Waktu		Desa	Isi Bimbingan	Unsur Yang Dibimbing		
	Mulai	Selesai	Pulau Palas		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Jum'at, 28 februari 2019				Rapat kerja bersama BPD Desa Pulau Palas mengenai pemantauan pembangunan dan musyawarah Desa	Syariful Anam	Ketua BPD	

Dibuat oleh

TPP P3MD Provinsi Riau

Asnah

Pendamping Lokal Desa

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang evaluasi pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dikembangkan beberapa kesimpulan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan evaluasi pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Perencanaan adalah Proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cakupan pencapaian untuk mencapai tujuan, dari indikator Perencanaan dalam pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa adalah baik karena keberhasilan tugas tersebut tetap berjalan walau ada kendala dalam kegiatan dan aturan yang ditetapkan terhadap masyarakat sehingga apa yang dicapai dalam program tersebut belum tepat sasaran secara menyeluruh dan sesuai.
2. Selanjutnya terhadap pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa adalah cukup baik dengan baik dan hanya sedikit kendala pada proses pengembangan yang lebih luas dan bertujuan pada masyarakat.

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemberdayaan tanggapan responden tentang evaluasi pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir di kategorikan baik, dilihat dari indikator pemberdayaan sudah efektif dan tepat sasaran menyentuh secara langsung masyarakat dari program pemberdayaan
4. Di dalam proses pemantauan aturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi pendamping lokal desa ini sudah dikategorikan baik walau terdapat beberapa kekurangan yaitu belum dijelaskan secara lebih apa yang menjadi tujuan pokok tugas dan fungsi dalam program yang akan diatur baik itu kepada pemerintah daerah, mitra atau instansi perusahaan, maupun organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperan.

B. Saran

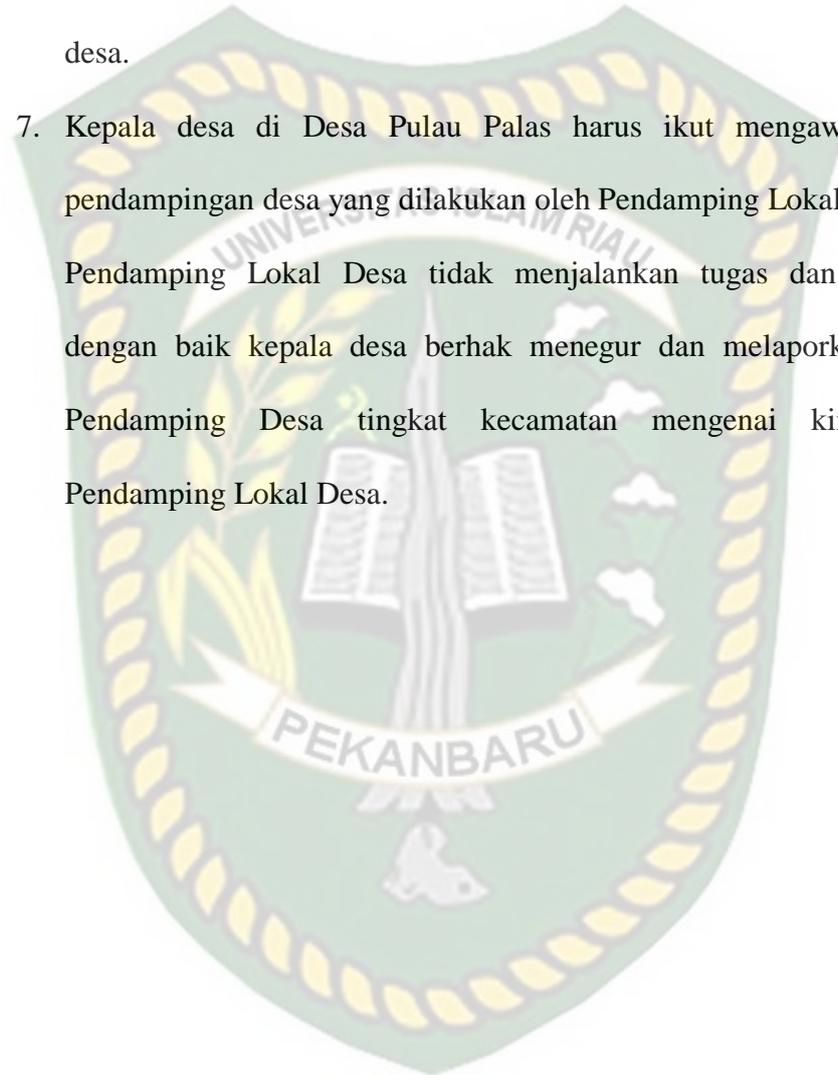
Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini sehubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Sebagai Diharapkan kepada Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas agar lebih berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Sebaiknya pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan pemantauan secara langsung mengenai kinerja dari Pendamping Lokal

Desa, pemerintah dapat memberikan reward kepada Pendamping Lokal Desa yang berprestasi agar bisa lebih memotivasi pendamping untuk melaksanakan tugas dengan maksimal. Serta memberikan punishment untuk pendamping yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Pemerintah perlu merevisi kembali persyaratan rekrutmen Pendamping Desa mengenai kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja dari calon Pendamping Lokal Desa dan harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
4. Pemerintah perlu membentuk tim satuan kerja untuk melakukan peninjauan langsung terhadap bagaimana perilaku dan bentuk pertanggungjawaban kerja yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa.
5. Perlu adanya keterbukaan dan sosialisasi pada proses rekrutmen agar masyarakat bisa ikut mengawasi serta mengetahui apa saja standar penerimaan dari Pendamping Lokal Desa. Pemerintah juga perlu melaksanakan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Pelatihan dapat berupa pelatihan fisik agar pendamping dapat menjalankan tugas dengan maksimal, pelatihan moral dan spiritual agar didapatkan pendamping yang jujur dan berkompeten, pelatihan kedisiplinan agar didapatkan pendamping yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, pelatihan kepemimpinan agar pendamping bisa mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik.

6. Perlu adanya sarana kerja untuk Pendamping Lokal Desa agar dapat memotivasi pendamping dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra kerja yang baik untuk kepala desa dalam peningkatan pembangunan desa.
7. Kepala desa di Desa Pulau Palas harus ikut mengawasi proses pendampingan desa yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa. Jika Pendamping Lokal Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik kepala desa berhak menegur dan melaporkan kepada Pendamping Desa tingkat kecamatan mengenai kinerja dari Pendamping Lokal Desa.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, N. 2003. *Kebijakan Pemerintahan*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Indra Prahasta.
- Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Kelapa Gading: Permai.
- Kansil, CST dan Christine S.T Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press
- Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Moh, Nazir. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: grasindo.
- Rasyid, Ryass 1996, *Makna Pemerintahan*, PT. Mutiara Sumber Daya Widya, Jakarta.
- Ratna Sajekti Rusi. (1988). *Tes dan Pengukuran*. Jakarta: Depdikbud.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantittatif dalam Bidang Kesehatan*. Jakarta: Nuha Medika
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

Slamet Hari Sutanto. 2017. *Implementasi Program Pendamping Profesional Desa Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro*. 11 (1): 5

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan